

TESIS

**PERAN NOTARIS TERKAIT PERLINDUNGAN
HUKUM BAGI KREDITUR PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI**



Diajukan oleh :

ARTHUR ANDEN

NIM. 2420216310087

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN BANJARMASIN**

JUNI 2026

**PERAN NOTARIS TERKAIT PERLINDUNGAN
HUKUM BAGI KREDITUR PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Kenotariatan
Pada Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat**

**Diajukan Oleh:
ARTHUR ANDEN
NIM.2420216310087**

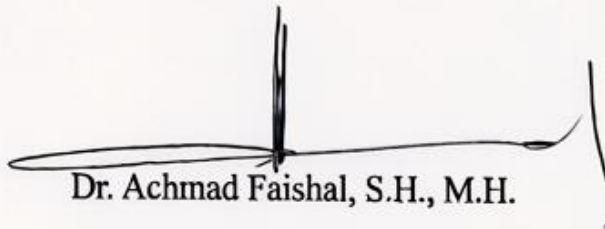
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
BANJARMASIN**

JUNI 2026

Tesis ini
telah diperiksa dan disetujui
pada tanggal 22 Juni 2026

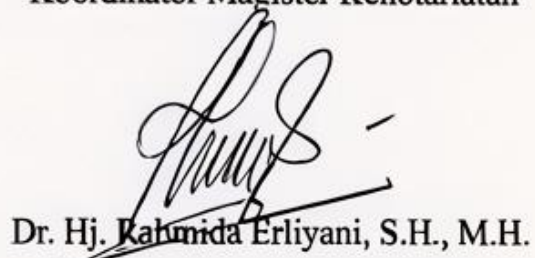
PEMBIMBING



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 19750615 200312 1 001

Diketahui oleh
Ketua Program Studi
Koordinator Magister Kenotariatan



Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

NIP. 19730420 200312 2 002

Diketahui oleh Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 19750615 200312 1 001

**Tesis ini telah dipertahankan di depan
Sidang Panitia Penguji
Pada Tanggal**

Susunan Panitia Penilai

Ketua :Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H.,M.H
Sekretaris :Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H
Anggota : Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arthur Anden

NIM : 2420216310087

Program Studi : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas
Lambung Mangkurat Banjarmasin

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin,Juni 2026

Yang Membuat Pernyataan

ARTHUR ANDEN
NIM 2420216310087



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM**

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

diberikan kepada :

**ARTHUR ANDEN
NIM. 2420216310087**

**MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

Judul Tesis :

**PERAN NOTARIS TERKAIT PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Telah dideteksi tingkat plagiasinya sebesar : 9%
sesuai dengan kriteria teloransi $\leq 20\%$ dan dinyatakan bebas plagiasi

Banjarmasin, 23 Juni 2026

Mengetahui,
An. Dekan



Dr. Ahmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

Koordinator Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa
Fakultas Hukum ULM

Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

RINGKASAN

PERAN NOTARIS TERKAIT PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Oleh:

Arthur Anden¹, Achmad Faishal²

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 101 halaman

Lembaga jaminan fidusia merupakan instrumen hukum yang vital dalam sistem pembiayaan di Indonesia, memungkinkan debitur tetap menguasai fisik objek jaminan (*constitutum possessorium*) sambil menyerahkan hak kepemilikannya secara yuridis kepada kreditur. Sebelum adanya intervensi konstitusional, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan kekuatan eksekutorial yang sangat kuat kepada kreditur melalui mekanisme *parate executie*, yakni hak untuk menjual objek jaminan atas kekuasaannya sendiri tanpa campur tangan pengadilan, berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang berkekuatan setara putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun, praktik eksekusi ini kerap memicu tindakan sewenang-wenang di lapangan, termasuk penarikan paksa kendaraan oleh debt collector yang disertai kekerasan fisik, yang secara fundamental bertentangan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan hak konstitusional debitur. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 kemudian hadir sebagai koreksi atas ketidakseimbangan tersebut, dengan menetapkan bahwa eksekusi jaminan fidusia hanya sah apabila memenuhi dua syarat kumulatif: adanya kesepakatan tertulis mengenai terjadinya cedera janji dan kesukarelaan debitur dalam menyerahkan objek jaminan. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, kreditur diwajibkan menempuh jalur pengadilan (*fiat executie*), suatu pergeseran paradigma yang fundamental dari kemudahan eksekusi langsung menuju keharusan intervensi yudisial. Perubahan ini menempatkan Notaris sebagai pejabat umum pembuat akta autentik pada posisi strategis yang sangat menentukan dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum kreditur dan perlindungan hak konstitusional debitur.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran Notaris terkait perubahan pengaturan hukum tentang jaminan fidusia, mulai dari sistem eksekusi lama yang berbasis *parate executie absolut* hingga regulasi terbaru pasca Putusan

¹ NIM: 2420216310087

² Pembimbing

Mahkamah Konstitusi, sekaligus menganalisis perbandingan karakteristik akta jaminan fidusia yang dibuat Notaris berdasarkan aturan lama dengan akta yang disusun berdasarkan aturan terbaru. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya literatur di bidang Hukum Kenotariatan dan Hukum Jaminan, khususnya mengenai dinamika karakteristik akta jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi dan panduan bagi para Notaris dalam memitigasi risiko hukum serta merumuskan klausula akta fidusia yang aman dan berkepastian hukum. Di samping itu, penelitian ini juga berguna bagi lembaga pembiayaan selaku kreditur dan masyarakat selaku debitur dalam memahami hak, kewajiban, dan tata cara eksekusi jaminan yang sesuai dengan hukum positif yang berlaku, sehingga tercipta ekosistem pembiayaan yang adil, pasti, dan bermanfaat bagi seluruh pihak.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (legal research) yang memposisikan hukum sebagai sistem norma yang bersifat otonom, logis, dan tertutup. Fokus utama diarahkan pada analisis mendalam terhadap norma-norma hukum positif dalam hierarki peraturan perundang-undangan serta asas-asas hukum yang menjadi landasannya. Guna membedah instrumen hukum secara komprehensif, penelitian ini menerapkan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang menganalisis kesesuaian antara peraturan dengan isu hukum yang diteliti, dan pendekatan konseptual (conceptual approach) yang menggali pembenaran ilmiah melalui doktrin serta prinsip-prinsip hukum dari para ahli kenotariatan terkemuka. Seluruh pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menghimpun bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan artikel hukum, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dan deduktif, menarik prinsip hukum yang bersifat umum menuju kesimpulan khusus, guna menghasilkan pemecahan masalah yang tidak hanya legalistik tetapi juga memiliki kedalaman koherensi dengan prinsip kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak.

Hasil dari penelitian ini adalah:

1. Perubahan pengaturan hukum fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi telah menggeser paradigma eksekusi dari *parate executie* absolut menuju mekanisme bersyarat, yang secara fundamental mentransformasi peran Notaris dari sekadar pencatat kehendak pasif menjadi penjamin kepastian eksekutorial dan pelindung kepentingan hukum bagi para pihak. Notaris kini wajib merumuskan klausula wanprestasi secara spesifik dan terukur, menjalankan fungsi penyuluhan hukum (*voorlichting*) secara aktif guna mencegah cacat kehendak, serta memitigasi risiko hukum melalui verifikasi dokumen,

autentikasi *notice of default*, dan klausula penilaian independen agar akta tidak terdegradasi.

2. Perbandingan karakteristik akta jaminan fidusia menunjukkan pergeseran mendalam dari formalitas administratif menuju perumusan klausula yang bersifat preventif dan antisipatif. Akta aturan lama merumuskan klausula cedera janji secara umum dan normatif sehingga rentan disangkal debitur pasca putusan MK, sedangkan akta versi terbaru menuntut parameter wanprestasi yang detail dan limitatif, mencakup rincian kuantitatif seperti jumlah tunggakan dan durasi keterlambatan, serta rincian kualitatif seperti larangan pengalihan objek jaminan tanpa izin tertulis, disertai klausula kesediaan penyerahan objek jaminan secara sukarela oleh debitur, sehingga kekuatan eksekutorial fidusia tetap terjaga integritasnya tanpa harus selalu bergantung pada proses Pengadilan yang panjang.

PERAN NOTARIS TERKAIT PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Oleh:

Arthur Anden¹, Achmad Faishal²

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 101 halaman

ABSTRAK

Kata Kunci: Notaris, Jaminan Fidusia, *Parate Executie*, Putusan Mahkamah Konstitusi, Klausula Wanprestasi, Perlindungan Hukum, Kepastian Hukum

Penelitian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah merombak secara fundamental mekanisme eksekusi jaminan fidusia di Indonesia. Kewenangan *parate executie* yang semula bersifat absolut berdasarkan Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia kini menjadi bersyarat: eksekusi mandiri hanya sah apabila terdapat kesepakatan tertulis mengenai wanprestasi dan debitur bersedia menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Tanpa terpenuhinya kedua syarat tersebut, kreditur wajib menempuh jalur *fiat executie* melalui Pengadilan Negeri. Pergeseran paradigma ini secara langsung menciptakan celah hukum yang serius apabila klausula akta jaminan fidusia tidak diformulasikan secara presisi oleh Notaris. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Notaris dalam merespons perubahan pengaturan hukum fidusia serta membandingkan karakteristik akta jaminan fidusia berdasarkan aturan lama dan aturan terbaru. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, bersumber pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menegaskan dua hal. Pertama, Notaris tidak lagi berperan sebagai pencatat kehendak pasif, melainkan dituntut secara aktif merumuskan klausula wanprestasi secara limitatif dan kuantitatif, menjalankan penyuluhan hukum (*voorlichting*) guna mencegah cacat kehendak, serta membangun mekanisme *notice of default* yang terautentikasi untuk menjaga kekuatan eksekutorial akta. Kelalaian dalam hal ini berisiko mendegradasi akta autentik menjadi akta di bawah tangan dan membuka gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Notaris. Kedua, akta jaminan fidusia berdasarkan aturan lama merumuskan klausula wanprestasi secara umum dan rentan disangkal, sedangkan akta versi terbaru menuntut parameter yang rigid mencakup rincian nominal tunggakan, durasi keterlambatan secara definitif, larangan tindakan negatif debitur

¹ NIM: 2420216310087

² Pembimbing

atas objek fidusia, serta klausula kesediaan penyerahan objek secara sukarela sebagai syarat keabsahan eksekusi mandiri.

NOTARY'S ROLE RELATED TO LEGAL PROTECTION TO CREDITOR POST CONSTITUTIONAL COURT VERDICT

By:

Arthur Anden, Achmad Faishal

Master of Notary, Lambung Mangkurat University, 102 pages

ABSTRACT

Keywords: *Notary, Fiduciary Guarantee, Parate Executie, Constitutional Court Verdict, Breach of Contract Clause, Legal Protection, Legal Protection*

Study on Constitutional Court Verdict Number 18/PUU-XVII/2019 has remodeled fundamentally the mechanism of fiduciary security attachment in Indonesia. The power of *parate executie* which was previously in absolute nature based on Article 15 paragraph (2) and (3) of Act Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantee currently becomes conditional: standalone execution is only legal if there is written agreement on breach of contract and the debtor is willing to hand over the object of guarantee voluntarily. Without the compliance of the two said requirements, the creditor is obliged to take the way of *fiat executie* through the District Court. The switch of this paradigm may directly create serious legal loopholes if the clause of the fiduciary guarantee deed is not precisely formulated by the Notary. This study is aimed at analyzing the Notary's role in responding the amendment of fiduciary regulation and compare the characteristics of fiduciary guarantee deed based on former regulation and the new one. Method used is normative legal research with statute and conceptual approaches, and utilizing primary, secondary, and tertiary legal resources to be analyzed descriptive-analytically. The findings of the research are, firstly, the Notary no longer plays role as passive registrar of will, but he is obliged to transform to become legal architect who actively formulates the breach of contract clause limitatively and quantitatively, to carry out legal extension (*voorlichting*) in order to avoid defect of will, and to build mechanism of notice of default which is authenticated in order maintain the executorial force of the deed. In this matter negligence is risky to degrade the authentic deed to become unauthentic deed and to open lawsuit of tort against the Notary. Secondly, fiduciary guarantee deed based on former regulation formulated general breach of contract clause and it is vulnerable to be denied, whereas the new version deed requires rigid parameter which covers details of outstanding amounts, definitive duration of delay, prohibition of creditor's negative action upon the fiduciary object, as well as the clause on willingness to hand over the object voluntarily as the legality requirement for standalone execution.

Certified by



Drs. Werhan Asmin, S.H., M.H., M.Div.
Authorized Sworn Translator

¹Student Number: 2420216310087

²Supervisor

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Aut Viam Inveniam Aut Faciam”.

(Hannibal Barca)

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada:

Allah SWT, karena telah memberikan kesehatan, nikmat serta karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini.

Kedua orang tua saya, Bapak Way Hudi Anden dan Ibu Titin Rusnawati yang telah merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa, serta memberikan dukungan serta doa yang tiada henti. Tidak ada kata yang cukup untuk membalas kebaikan dan pengorbanan mereka selama ini kepada saya. Tesis ini adalah persembahan kecil saya, sebagai tanda bakti dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur Kepada Allah SWT Atas Segala Rahmat Dan Penyertaan-Nya Sehingga Tesis Ini Yang Berjudul **“Peran Notaris Terkait Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”** dapat diselesaikan sebagai syarat tugas akhir pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Ibu Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat dan selaku Sekretaris Penguji, atas perhatian, koreksi, dan masukan yang sangat berarti, terutama dalam aspek metodologi dan sistematika penulisan, yang turut menyempurnakan tesis ini;
3. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing, yang dengan sabar meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing, mengarahkan, serta memberikan masukan yang sangat berharga sejak awal hingga terselesaikannya tesis ini;
4. Bapak H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji, yang telah bersedia menguji dan memberikan kritik serta saran yang konstruktif dalam sidang tesis, sehingga karya ini menjadi lebih baik dan lebih mendalam secara akademik;
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Pengajar pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu hukum, khususnya di bidang kenotariatan dan hukum agraria, yang menjadi fondasi utama dalam penyusunan tesis ini;
6. Seluruh Bapak/Ibu Staf Akademik, Staf Keuangan, Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
7. Kedua orang tua penulis yang terkasih, serta kakak penulis, yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan moral, material, dan semangat;
8. Seluruh keluarga besar, yang telah memberikan doa restu, perhatian, dan dukungan tulus dari jauh maupun dekat. Kehangatan keluarga adalah rumah yang selalu dirindukan dan menjadi penyemangat di setiap langkah;
9. Para sahabat seperjuangan di Program Magister Kenotariatan, yang bersama-sama berbagi suka, duka, diskusi, tawa, dan rasa lelah dalam menempuh pendidikan ini. Terima kasih atas kebersamaan, motivasi, dan bantuan kalian selama ini. Perjalanan ini terasa lebih ringan karena kalian ada;
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu namanya, namun telah memberikan kontribusi, bantuan, doa, dan dukungan dalam bentuk apa pun

selama proses penyusunan tesis ini. Semoga kebaikan kalian mendapat balasan yang berlipat dari Tuhan Yang Maha Esa.

Akhir kata, sekali lagi penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga Tuhan Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan dengan berkat yang berlipat ganda. Penulis juga berharap tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum kenotariatan dan hukum agraria, serta dapat menambah wawasan dan pemahaman bagi siapa pun yang membacanya.

Banjarmasin,Juni 2026

Hormat Penulis

Arthur Anden
NIM 2420216310087

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DEPAN.....	i
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	v
RINGKASAN.....	vi
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT	xii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xiii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang masalah	1
B. Rumusan masalah.....	8
C. Keaslian penelitian	8
D. Tujuan penelitian.....	11
E. Kegunaan Penelitian.....	11
F. Tinjauan Pustaka	12

1. Kerangka Teori	12
2. Kerangka konseptual	18
G. Metode penelitian	27
1. Jenis Penelitian	27
2. Pendekatan Masalah	28
3. Sifat Penelitian	29
H. Pertanggungjawaban Sistematika penulisan.....	32
BAB II PERAN NOTARIS TERKAIT PERUBAHAN PENGATURAN	
HUKUM TENTANG FIDUSIA	35
A. Konsep Dasar dan Karakteristik Jaminan Fidusia di Indonesia. ...	35
B. Kedudukan, Peran, dan Kewenangan Notaris dalam Pembuatan	
Akta Autentik	47
C. Tinjauan Yuridis Kekuatan Eksekutorial (<i>Parate Executie</i>) dalam	
Akta Notaris.....	56
BAB III PERBANDINGAN KARAKTERISTIK AKTA JAMINAN	
FIDUSIA BERDASARKAN ATURAN LAMA DAN BARU	69
A. Problematika prosedur eksekusi dan kemanfaatan akta autentik	
dalam praktik perdata	69
B. Analisis Perubahan Klausula Akta Jaminan fidusia mengenai	
wanprestasi.....	77

C. Mitigasi Risiko Hukum oleh Notaris Peran Officium Nobile dalam Pencegahan Sengketa	83
D. Formulasi Klausula Adaptif dalam Akta Jaminan Fidusia sebagai Upaya Preventif Notaris Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi....	90
BAB IV PENUTUP	98
DAFTAR PUSTAKA	